

KRISIS LEGITIMASI TERHADAP PEMERINTAHAN JUNTA MILITER DI MYANMAR

Hanifahturahmi¹, Ahmad Saudi², A'ang Chaarnaillan³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, STISIP Persada Bunda, Pekanbaru, Indonesia
hanifahturahmi20@gmail.com

²Program Studi Ilmu Komunikasi, STISIP Persada Bunda, Pekanbaru, Indonesia
ahmadsaudi9145@gmail.com

³Program Studi Ilmu Komunikasi, STISIP Persada Bunda, Pekanbaru, Indonesia
chaarnaillan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis legitimasi yang terjadi di Myanmar terhadap pemerintahan Junta militer. Permasalahan dalam penelitian dianalisis menggunakan teori legitimasi dan konsep-konsep demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berbagai data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa krisis legitimasi terhadap pemerintahan Junta militer di Myanmar dapat ditinjau melalui kudeta pertama yang telah dilakukan oleh Junta Militer terhadap pemerintahan sipil di Myanmar hingga kudeta ketiga yang belum lama ini terjadi. Kudeta merupakan langkah militer untuk mempertahankan keberlanjutan kekuasaannya di Myanmar agar tetap eksis dan memiliki pengaruh di dalam politik dan pemerintahan Myanmar. Namun dalam upaya untuk mempertahankan keberlanjutan kekuasaannya, Junta militer mengabaikan nilai-nilai dan prinsip demokrasi dimana rakyat juga berhak menentukan, memilih dan mendukung berkuasanya pemerintahan sipil yang menang di dalam pemilu. Pengambil alihan kekuasaan pemerintahan yang dilakukan Junta militer melalui kudeta mendapat penolakan dan protes hingga perlawanan dari masyarakat Myanmar. Berbagai respon dari masyarakat internasional juga bermunculan untuk menentang legitimasi pemerintahan Junta Militer di Myanmar karena kudeta tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia dan menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Kata Kunci: Legitimasi; Keberlanjutan Kekuasaan; Militer.

Abstract

This reserach aims to analyze the legitimacy crisis that occurred in Myanmar against the military junta government. The problems in the research were analyzed using the theory of legitimacy and the concepts of democracy. This research uses qualitative methods with various data and information obtained through literature study. The results of this research indicate that the crisis of legitimacy against the military Junta government in Myanmar can be reviewed through the first coup that has been carried out by the Military Junta against the civilian government in Myanmar until the third coup that recently occurred. The coup is a military move to maintain the continuity of its power in Myanmar in order to continue to exist and have influence in Myanmar's politics and government. However, in an effort to maintain the continuity of its power, the military junta ignores the values and principles of democracy where the people also have the right to determine, vote and support the reign of a civilian government that wins in elections. The takeover of government power by the military junta through a coup was rejected and protested to resistance from the people of Myanmar. Various responses from the international community also emerged to oppose the legitimacy of the military junta government in Myanmar because the coup was considered a serious violation of human rights and caused many casualties.

Keywords: Legitimacy; Sustainability of Power; Military.

PENDAHULUAN

Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara dengan kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil, karena kuatnya pengaruh Junta militer di dalam sistem pemerintahan Myanmar. Kuatnya pengaruh militer dalam pemerintahan Myanmar menghambat proses demokratisasi di Myanmar. Walaupun sudah dilakukan upaya demokratisasi, namun sistem politik yang dijalankan berkesan tidak demokratis dalam pandangan masyarakat internasional. Demokrasi yang berlangsung di Myanmar tidak disertai dengan pelaksanaan nilai-nilai HAM. Myanmar merupakan satu dari sekian banyak negara dunia ketiga yang mengalami kasus perebutan kekuasaan oleh militer, seperti di negara-negara Amerika Latin, Afrika dan Timur Tengah.

Keterlibatan militer di dalam politik dapat dibedakan menjadi empat tingkatan. Tingkatan pertama, mempengaruhi pemerintahan sipil agar berpihak pada kepentingan militer. Tingkatan kedua, melakukan tekanan dan kekerasan kepada pemerintahan sipil. Tingkatan ketiga, mengganti pemerintahan sipil (*displacement*) yang sedang berkuasa dengan pejabat lain yang dianggap akan mendatangkan keuntungan bagi militer. Tingkatan keempat, pengambil alihan pemerintahan sipil oleh pemerintahan militer (Ambarwati, 2021). Keterlibatan Militer di Myanmar berada pada level keempat, dimana Junta militer telah mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil melalui kudeta.

Pada tanggal 1 Februari 2021 Junta militer Myanmar melakukan kudeta dengan menahan Aung San Suu Kyi yang merupakan Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) serta beberapa pejabat NLD lainnya. Kemenangan Suu Kyi di dalam Pemilu diklaim sebagai penipuan sehingga Junta militer yang mendukung kelompok oposisi menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang. Saat ini kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh Junta militer dan diserahkan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing (kompas.com, 2021).

Kudeta yang dilakukan militer juga disertai dengan pemberlakuan jam malam, pemutusan jaringan internet, pembatasan kerumunan, pengerahan kendaraan lapis baja dan penggunaan kekerasan guna menekan aksi protes (Roza, 2021). Kudeta oleh Junta militer menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Myanmar yang menentang kekuasaan militer. Aksi demonstrasi ini tidak terlepas dari krisis kepercayaan rakyat Myanmar terhadap pemerintahan militer yang melakukan kecurangan dan intervensi

dalam hasil pemilu dan model pemerintahan yang dijalankan oleh Junta militer di masa lalu dengan menggunakan kekerasan.

Akibat yang ditimbulkan dari kudeta militer ini tentunya tindak kekerasan terhadap massa yang anti terhadap kudeta. Berdasarkan data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada bulan Agustus 2021, lebih dari seribu massa telah terbunuh di dalam aksi demonstrasi tersebut. Junta militer sebelumnya akan memberlakukan status darurat nasional selama satu tahun, namun yang terjadi adalah pengangkatan Perdana Menteri baru dari pihak militer dan perpanjangan darurat nasional sampai dengan Agustus 2023 (CNN Indonesia, 2021).

Kudeta yang terjadi pada awal bulan Februari bukanlah kudeta pertama yang terjadi di Myanmar. Pada tahun 1962, Militer juga pernah mengambil-alih kekuasaan pemerintahan semidemokrasi yang sedang berjalan yang menjadi tonggak awal berkuasanya militer di Myanmar. Kudeta pertama ini dipimpin oleh Jenderal Ne Win dengan menurunkan Perdana Menteri U Nu yang telah menjabat sejak tahun 1948 yang diklaim tidak memiliki kapabilitas dalam memimpin negara (Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021).

Langkah yang ditempuh oleh militer untuk mendapatkan legitimasi melalui kudeta ini dinilai sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan keberlanjutan kekuasaan militer di dalam pemerintahan Myanmar. Langkah militer untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat Myanmar ditunjukkan dengan adanya pengumuman pembatalan resmi hasil pemilu yang dilakukan pada bulan November 2020 yang dinilai terdapat kecurangan. Sementara disisi lain, masyarakat menilai pemilu telah berjalan secara demokratis dengan terpilihnya seorang pemimpin yang sebelumnya sudah memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di Myanmar.

PBB melalui utusan khusus, Christine Schraner Burgener telah memberikan peringatan kepada Militer Myanmar. Peringatan tersebut berupa pesan untuk melindungi rakyat Myanmar, yang isinya bahwa masyarakat internasional sedang mengawasi setiap aksi Militer terutama penggunaan kekerasan terhadap demonstran akan memiliki konsekuensi berat (Roza, 2021). Begitu pula di dalam forum ASEAN, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia meminta seluruh negara anggota ASEAN menjalankan prinsip *non interference* disamping juga sama pentingnya dengan menghormati nilai-nilai lain yang terdapat di dalam piagam ASEAN seperti menghormati jalannya demokrasi, HAM, *good governance*, supremasi hukum dan *constitutional government*. Artinya kudeta Militer yang terjadi di Myanmar tidak hanya mendapatkan respon dari rakyat Myanmar melainkan juga dari

masyarakat internasional mengingat besarnya dampak kudeta terhadap keselamatan rakyat Myanmar yang anti terhadap kudeta. Penelitian ini akan membahas tentang krisis legitimasi terhadap Junta Militer Myanmar yang selalu berupaya untuk dapat berkuasa serta mempengaruhi politik dan pemerintahan di Myanmar dengan cara kudeta.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan telaah pustaka terhadap berbagai informasi dan data yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Informasi dan data tersebut diperoleh dari berbagai buku, jurnal, ulasan pers dan artikel-artikel yang dapat dipercaya. Teknik analisis data yang digunakan berupa model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Sustainability of Power Junta Militer

Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki sejarah panjang keterlibatan militer di dalam sistem politik dan pemerintahannya hingga saat ini. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Myanmar pasca kemerdekaan yang menghadapi berbagai ancaman dari gerakan komunis dan pemberontakan bersenjata dari berbagai kelompok etnis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong keterlibatan militer di dalam pemerintahan sipil di Myanmar.

Pada tanggal 29 Oktober 1958 untuk pertama kalinya militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win diambil sumpahnya sebagai pemimpin kabinet yang akan tunduk pada konstitusi dan demokrasi serta melaksanakan pemilu dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi pada tahun 1960 (Wahono, 2005). Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1960 tersebut kemudian dimenangkan oleh Perdana Menteri U Nu yang sebelumnya pernah menjabat. Dalam dua tahun masa jabatannya, kondisi perpolitikan Myanmar belum cukup stabil sehingga menjadi peluang bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan sipil melalui kudeta.

Sejak Myanmar merdeka hingga saat ini, pihak militer sudah tiga kali melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil dengan berbagai alasan, terutama karena pemerintahan sipil dianggap tidak dapat mengendalikan kondisi negara serta meningkatkan perekonomian

negara. Kudeta pertama yang dilakukan oleh Junta militer terjadi pada tanggal 2 Maret 1962. Kudeta ini dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang berupaya menurunkan Perdana Menteri U Nu yang telah berkuasa sejak tahun 1948. Kudeta inilah yang menandai dimulainya kekuasaan rezim militer dengan pemerintahan satu partai selama 26 tahun di Myanmar. Pada tahun 1974 Jenderal Ne Win mengesahkan sebuah konstitusi baru dan mengizinkan terlaksananya pemilu. Namun hal tersebut hanya sebagai formalitas karena kekuasaan tetap dialihkan kepada pemerintahan militer yang sedang berkuasa. Kondisi menimbulkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan militer sehingga menimbulkan bentrokan antara sipil dan militer (Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021). Artinya selama periode ini tidak terjadi distribusi kekuasaan antara militer dan sipil, sehingga nilai-nilai demokrasi dikesampingkan.

Kudeta kedua terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988 atau yang dikenal dengan Pemberontakan Kekuatan Rakyat yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Rakyat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran karena kekecewaannya terhadap pemerintahan militer. Agenda pemerintah Myanmar untuk penguatan militer menyebabkan Myanmar menjadi salah satu negara termiskin di dunia (Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021). Sejak berakhirnya masa pemerintahan Junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1988, pemerintah Myanmar mulai melakukan demokratisasi yang diawali dengan mengadakan pemilihan umum pada tahun 1990. Pada sudut pandang pemerintah Myanmar saat itu demokrasi merupakan sebuah solusi untuk menghindari pertentangan politik yang terjadi di Myanmar. Namun kondisi Myanmar sendiri tidak memungkinkan untuk melakukan demokratisasi. Hal ini dibuktikan dengan dengan ketidaksiapan pemerintah Myanmar atas kekalahannya di dalam pemilihan umum 1990 oleh partai oposisi.

Kudeta ketiga terjadi setelah pemilihan umum pada tanggal 8 November 2020, dimana pemilu dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi dengan selisih yang cukup besar dibandingkan pemilu sebelumnya dan mengalahkan Partai Militer dan Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan. Kudeta ketiga ini diawali dengan penangkapan penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai pemenang pemilu pada 1 Februari 2021 (Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021). Junta militer menganbil alih kekuasaan sipil dengan menunjuk penglima tertinggi Min Aung Hlaing dan memberlakukan darurat nasional. Kudeta ini dilatarbelakangi oleh kecurigaan pihak militer yang menganggap terdapat kecurangan di dalam hasil pemilu 2020. Berdasarkan aksi kudeta ketiga menunjukkan bahwa pihak militer tidak menerima

kekalahannya di dalam pemilu. Dalam hal ini terlihat bagaimana ketidak siapan militer dalam menjalankan sistem politik demokrasi, karena militer melakukan intervensi terhadap hasil pemilu yang sudah berjalan secara demokratis.

Sebagai sebuah sistem nilai, demokrasi merupakan produk dari suatu kondisi, artinya suatu bangsa dikatakan modern bukan karena demokrasi akan tetapi nilai-nilai demokratislah yang terdapat pada bangsa yang modern. Demokrasi dapat dijelaskan ke dalam tiga bentuk, yaitu demokrasi sebagai solusi; demokrasi sebagai sistem (alat); demokrasi sebagai *way of life* (Tjarsono, 2009).

Demokrasi sebagai solusi artinya implementasi demokrasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menggunakannya. Dengan demikian demokrasi akan menciptakan kesejahteraan pada suatu kondisi atau sebaliknya, demokrasi dapat menimbulkan anarkhis. Demokrasi sebagai sistem artinya demokrasi memerlukan prakondisi dimana masyarakat yang menggunakannya harus meyakini terlebih dahulu bahwa sumber legitimasi kekuasaan politik berasal dari bawah (*immament*) yaitu rakyat bukan dari atas (*transcendent*). Demokrasi sebagai *way of life* artinya demokrasi memiliki landasan idiil HAM yang didasarkan atas prinsip kebebasan, baik itu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut dan bebas memilih (Tjarsono, 2009).

Berdasarkan konsep demokrasi tersebut, butuh prakondisi agar masyarakat paham bahwa sumber legitimasi politik di dalam negara demokrasi bukan lagi berasal dari penguasa melainkan dari rakyat. Dalam hal ini Junta militer belum bisa melepaskan kekuasaan pemerintahan begitu saja. Junta militer selalu berupaya untuk bisa terlibat di dalam urusan politik dan mempengaruhi kebijakan politik bahkan ketika presiden yang terpilih adalah presiden yang dipilih secara demokratis. Artinya dapat disimpulkan bahwa kudeta yang dilakukan oleh Junta militer bukanlah suatu bentuk langkah memerangi kecurangan di dalam hasil pemilu melainkan sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan kekuasaan (*sustainability of power*) Junta militer di Myanmar agar bisa tetap eksis dan terlibat di dalam politik dan pemerintahan Myanmar.

Kekuasaan dan Legitimasi Junta Militer di Myanmar

Kudeta militer yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 mendapat respon dan penolakan yang cukup besar dari rakyat Myanmar. Perebutan kekuasaan dari pemerintahan sipil yang terpilih secara sah tentunya bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Kudeta ini mengingatkan kembali kepada kudeta dimasa lalu yang kemudian menimbulkan

pemberontakan rakyat secara besar-besaran. Pemberontakan yang dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi dan unjuk rasa. Pegawai negeri sipil bersama pegawai bank pemerintah dan swasta melakukan aksi mogok kerja. Sementara itu guru, siswa pendidikan dasar dan menengah beserta orang tua memboikot sekolah negeri. Universitas juga terlibat menjadi pusat perlawanan terhadap Junta Mmiliter (dw.com, 2021a).

Kudeta yang dilakukan oleh militer sangat mengancam keselamatan sipil. Sejak 100 hari setelah kudeta dimulai, Junta militer telah menutup media independent dan melakukan tindak kekerasan bersenjata terhadap berbagai aksi protes yang muncul. Berdasarkan perhitungan berbagai lembaga independent, ratusan aktivis telah ditangkap dan ditahan, sedangkan lebih dari 750 masyarakat yang melakukan unjuk rasa dan pengamat telah dibunuh. Kelompok-kelompok etnis minoritas di Myanmar seperti Kachin dan Karen juga ikut melakukan perlawanan terhadap pemerintahan militer sebagai bentuk dukungannya terhadap gerakan anti kudeta (dw.com, 2021a).

Satu tahun setelah kudeta berjalan belum terlihat upaya perdamaian dari pihak pemerintahan militer maupun masyarakat sipil. Berdasarkan temuan pakar militer Amerika Serikat, Pasukan Pertahanan Rakyat yang dibentuk pemerintah sipil bayangan sudah terbentuk di 50 tempat di Myanmar. Pasukan ini bekerjasama dengan kelompok pemberontakan etnis untuk melakukan serangan terhadap pemerintahan militer, polisi dan berbagai fasilitas pertahanan di Myanmar (dw.com, 2022).

Melihat berbagai aksi protes dan penolakan terhadap pemerintahan militer yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat menunjukkan bahwa telah terjadi krisis legitimasi terhadap Junta militer di Myanmar. Sebagai sebuah negara dengan sistem politik demokrasi sudah seharusnya pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah yang mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakatnya. Namun yang terjadi di Myanmar saat ini malah sebaliknya. Jika ditinjau melalui legitimasi subjek wewenang tentunya ada hal yang menjadi dasar wewenang Junta militer memegang kekuasaan negara dan membuat berbagai peraturan perundang-undangan termasuk pemberlakukan darurat nasional yang masih berjalan hingga saat ini.

Model pemerintahan yang dijalankan oleh Junta militer merupakan model pemerintahan yang otoriter sehingga legitimasi yang dimilikinya masuk ke dalam kategori legitimasi pragmatis. Pengambil alihan kekuasaan oleh pemerintahan militer menunjukkan bahwa secara *de facto* mereka menganggap dirinyalah yang tepat duduk di kursi

pemerintahan dengan alasan kestabilan nasional dan berjalannya pemerintahan yang teratur, tertib dan tanpa kecurangan. Namun perlu dipahami pula bahwa di dalam sistem demokrasi, legitimasi tertinggi berada ditangan rakyat. Sehingga rakyat juga berhak menentukan, memilih dan mendukung berkuasanya pemerintahan sipil.

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan serta dukungan masyarakat terhadap kekuasaan maupun kewenangan. Legitimasi merupakan istilah normative yang menggambarkan suatu kekuasaan yang memiliki keabsahan atau sesuai dengan peraturan yang ada, baik hukum formal, adat istiadat maupun norma atau hukum yang ada di masyarakat yang diakui secara sah dalam waktu yang cukup lama. Jean Jacques Rousseau di dalam bukunya *The Social Contract and Discourses* menyebutkan bahwa "*the strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty*" (Rousseau, 1968). Pemimpin pemerintahan akan selalu berupaya untuk memperoleh legitimasi atas kekuasaannya sehingga memungkinkan yang dipimpinnya untuk tunduk dan patuh secara sukarela. Dengan demikian, legitimasi merupakan kunci dalam menjaga stabilitas politik dimana merupakan sumber yang dapat mempertahankan dan menentukan keberhasilan suatu rezim politik, baik ditingkat nasional maupun global (Heywood, 2014).

Berbagai penolakan dan aksi protes masyarakat sipil Myanmar terhadap pemerintahan militer bukanlah tanpa alasan dengan melihat karakteristik Junta militer di masa lalu dalam menjalankan politik dan pemerintahannya. Pada umumnya negara demokrasi cenderung kepada distribusi kekuasaan model kerakyatan, Model kerakyatan atau populis merupakan bentuk distribusi kekuasaan yang didasarkan pada demokrasi. Sebagaimana demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang tentunya akan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat (Surbakti, 2010). Distribusi kekuasaan dengan model kerakyatan menyiratkan bahwa partisipasi rakyat dalam jumlah banyak memungkinkan untuk merumuskan suatu kebijakan politik. Setiap kebijakan yang dibuat di dasarkan pada tuntutan dan dukungan masyarakat. Dengan demikian setiap individu memiliki hak politik yang sama.

Namun tidak demikian yang terjadi di Myanmar ketika Junta militer memimpin. Model distribusi kekuasaan yang terjadi lebih kepada model elit yang memerintah. Berdasarkan model elit yang memerintah, ada tiga asumsi yang mendasarinya. Pertama, distribusi kekuasaan dalam setiap masyarakat tidak pernah merata karena kelas pemerintah

jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Kedua, karena jumlah pemerintah yang sedikit tersebut, elit politik dipahami sebagai sekelompok kecil orang yang memiliki banyak pengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Ketiga, adanya kesamaan nilai yang terdapat diantara elit politik sehingga ada usaha untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut sebagai bentuk upaya mempertahankan posisi sebagai elit politik (Surbakti, 2010). Distribusi kekuasaan dengan model elit yang memerintah menyiratkan bahwa distribusi kekuasaan di dalam suatu negara seringkali di dominasi oleh sekelompok elit politik tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat di dalam setiap pengambilan keputusan politik, seperti halnya yang terjadi di dalam pemerintahan Junta militer. Kecenderungan terhadap pemusatan kekuasaan di tangan militer menunjukkan terbatasnya keterlibatan rakyat di dalam sistem politik di Myanmar, bahkan ketika sistem politik demokrasi berlangsung di bawah pemerintahan sipil, militerpun tetap melakukan intervensi.

Kudeta yang dilakukan oleh Junta militer menunjukkan bahwa militer tidak siap memberikan kewenangan pemerintahan seutuhnya kepada sipil. Namun demikian keterlibatan Junta militer di dalam sistem politik dan pemerintahan Myanmar pada dasarnya tidak mendapat dukungan dari rakyat Myanmar karena ketidakpercayaan rakyat terhadap kinerja militer di masa lalu yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan pemerintahan di Myanmar. Junta militer mengabaikan pentingnya pengakuan rakyat terhadap kepemimpinan, bahkan memerangi masyarakat sipil yang menentang kebijakannya.

Respon Masyarakat Internasional terhadap Legitimasi Junta Militer Myanmar

Satu tahun setelah kudeta dimulai, berbagai respon dari masyarakat internasional bermunculan disamping juga memantau kondisi di Myanmar. Berdasarkan data organisasi HAM, Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), kudeta telah menyebabkan 1463 masyarakat sipil meninggal dunia. Sedangkan data dari lembaga pemantau konflik, *The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, menunjukkan jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 11.000 orang. Pada akhir bulan Januari 2022, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan data sebanyak 1,6 juta penduduk Myanmar kehilangan mata pencaharian. Sementara itu informasi dari PBB, sebanyak 350.000 penduduk Myanmar saat ini berstatus sebagai pengungsi domestik (dw.com, 2022).

Masyarakat internasional mengecam kudeta yang dilakukan oleh Junta militer dan menentang legitimasi Junta militer sebagai pemimpin Myanmar karena menilai legitimasi

terhadap pemerintahan Junta militer harus memenuhi prinsip demokrasi. Berdasarkan hukum internasional yang berlaku, Dewan Keamanan PBB tidak mengatur secara jelas tentang kudeta. Berdasarkan piagam PBB pasal 2 ayat 7, PBB tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan tersebut (Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Junta militer bukan lagi dipandang sebagai isu domestik karena dinilai sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kudeta yang dilakukan oleh Junta militer dinilai tidak memiliki legalitas, untuk itu perlu ditinjau dampaknya terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional.

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara juga tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan di Myanmar karena Adanya prinsip non-intervensi yang juga tertuang di dalam Piagam ASEAN. Disamping adanya prinsip non-intervensi, negara-negara anggota ASEAN juga tidak satu suara dalam menyikapi kudeta yang dilakukan oleh Junta militer. ASEAN yang dipimpin oleh Brunei Darussalam telah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta pada tanggal 24 April 2021. Dalam hal ini Menteri luar negeri Indonesia menyampaikan sambutan terkait komitmen para pemimpin dan kekhawatiran ASEAN terhadap kondisi yang terjadi di Myanmar serta bertekad membantu Myanmar menyelesaikan krisis yang sedang terjadi (Ramadhan & Mabrurah, 2021).

KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta tersebut menawarkan *five point consensus* kepada Myanmar, namun Myanmar belum menyetujui konsensus tersebut. *Five point consensus* merupakan solusi damai yang ditawarkan oleh negara anggota ASEAN yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo untuk menghentikan kekerasan dan menjaga perdamaian serta stabilitas politik di Myanmar. Konsensus ini juga didukung oleh PBB, Tiongkok, Amerika Serikat dan Australia.

Respon terhadap legitimasi Junta militer juga muncul dari beberapa negara yang berada di luar Kawasan Asia Tenggara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Eropa. Amerika Serikat mempertimbangkan sanksi terhadap Myanmar. Uni Eropa telah membekukan penjualan dan transfer senjata ke Myanmar. Uni Eropa memberikan sanksi kepada sembilan anggota Dewan Administrasi Negara Junta dengan pelarangan perjalanan dan membekukan asset mereka. Uni Eropa juga memberikan sanksi berupa pembekuan asset dan larangan visa kepada dua perusahaan besar di Myanmar yaitu *Myanmar Economic*

Corporation (MEC) dan *Myanmar Economic Holdings Ltd* (MEHL) yang mendominasi sektor-sektor termasuk perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen (dw.com, 2021b). Respon yang sama juga muncul dari Selandia Baru dengan memutus hubungan dengan pemerintahan Junta militer, menanggukhan bantuan dan memberlakukan larangan perjalanan bagi para pemimpin pemerintahan militer Myanmar. (Roza, 2021).

Walaupun masyarakat internasional telah memberikan respon terhadap legitimasi pemerintahan Junta militer terkait pelanggaran HAM yang terjadi akibat kudeta, namun hal tersebut belum mengubah kebijakan pemerintahan militer di Myanmar. Hingga saat ini status Myanmar masih berada dibawah kepemimpinan Junta militer dan pemberontakan terhadap pemerintahan Junta militer semakin meningkat dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat sipil maupun kelompok separatis di Myanmar. Pemerintahan Junta militer bahkan memerangi siapa saja dari masyarakatnya yang menentang kekuasaannya dengan melakukan berbagai perlawanan atau pemberontakan.

KESIMPULAN

Krisis legitimasi terhadap pemerintahan Junta militer di Myanmar dapat dilihat sebagai akibat dari kudeta yang dilakukan oleh Junta militer terhadap pemerintahan sipil di Myanmar. Kudeta merupakan bentuk upaya pengambilalihan kekuasaan yang lazim terjadi di Myanmar mengingat sudah tiga kali terjadi sejak kemerdekaan Myanmar hingga saat ini. Myanmar merupakan negara sistem politik demokrasi, namun kudeta yang terjadi telah mengabaikan penerapan nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang seharusnya dihormati. Kudeta bahkan memicu munculnya berbagai respon baik dari masyarakat Myanmar itu sendiri maupun dari masyarakat internasional karena pemerintahan Junta militer mengabaikan pentingnya dukungan dan pengakuan dari rakyat dan memilih untuk kebijakan untuk memerangi siapa saja yang menentang pemerintahan Junta militer yang sedang berkuasa saat ini. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM karena menimbulkan banyak korban jiwa dan dibatasinya hak-hak sipil rakyat Myanmar.

Respon masyarakat internasional terhadap tindakan pelanggaran HAM yang pernah terjadi tidak selalu dapat menyelesaikan permasalahan dan bahkan menimbulkan ketidakpuasan di beberapa negara seperti halnya yang terjadi di Myanmar. Apa yang terjadi di Myanmar setidaknya menunjukkan ketidakjelasan pengaturan di dalam hukum internasional terkait kudeta militer serta adanya prinsip non intervensi, baik yang tertuang di

dalam piagam ASEAN maupun piagam PBB. Dengan demikian di dalam hubungan internasional kekuasaan tertinggi berada di tangan negara. Setiap negara memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga tidak ada yang berhak mengatur secara sepihak pelaksanaan demokrasi di dalam suatu negara serta ikut campur dalam pelaksanaan sistem politik suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati. (2021). Kultur Militerisme di Myanmar. *Perspektif*, 18 (2): 01–20.
- CNN Indonesia. (2021). *Aktivis Kuak Lebih dari 1000 Orang Tewas Sejak Kudeta Myanmar*. Diunduh di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210818142540-106-681931/aktivis-kuak-lebih-dari-1000-orang-tewas-sejak-kudeta-myanmar> tanggal 24 Januari 2022
- dw.com. (2021a). *100 Hari Kudeta Militer Myanmar: Misi ASEAN Tumpul. Perlawanan terhadap Rezim Meluas*. Diunduh di <https://www.dw.com/id/kudeta-militer-myanmar-misi-asean-tumpul-perlawanan-terhadap-rezim-meluas/a-57503947> tanggal 27 Februari 2022
- dw.com. (2021b). *Terapkan Sanksi Baru, UE Ingin Desak Junta Militer di Myanmar Berunding Akhiri Kekerasan*. Diunduh di <https://www.dw.com/id/sanksi-baru-ue-untuk-myanmar-akan-paksa-junta-berunding/a-57259395> tanggal 03 Maret 2022
- dw.com. (2022). *Setahun Setelah Kudeta, Nasib Myanmar Semakin Tidak Menentu*. Diunduh di <https://www.dw.com/id/setahun-kudeta-nasib-myanmar-semakin-tidak-menentu/a-60612674> tanggal 27 Februari 2022
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, F. M., & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3 (1) : 113-129
- kompas.com. (2021). *Awal Mula Kerusuhan Myanmar: Dipicu Kudeta, Militer Berkuasa*. Diunduh di <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/162024770/awal-mula-kerusuhan-myanmar-dipicu-kudeta-militer-berkuasa?page=all> tanggal 21 Januari 2022
- Ramadhan, Z., & Maburrah. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, 5 (2): 126-142.
- Rousseau, J. J. (1968). *The Social Contract And Discourses*. London: Everyone's Library.
- Roza, R. (2021). Kudeta Militer di Myanmar: Ujian Bagi ASEAN. *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13 (4): 7–12.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

- Tjarsono, I. (2009). Aristo Demokrasi Solusi Masalah Bangsa (Tinjauan Filosofis) dalam Paradigma freedom of Speech. *Jurnal Transnasional*, 1 (1).
- Wahono. (2005). *Kebertahanan Pemerintahan Junta Militer Myanmar Menghadapi Oposisi, Tekanan Asing, dan Gerakan-Gerakan Perlawanan*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.